

ABSTRAK

AJI SATRIA WIBISONO, NIM.: 202102020112, 2024, IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN TRENGGALEK, Pembimbing 1: Dr. Imam Fachrudin, M.Si., Pembimbing 2: Dr. Daimul Abror M.Si Program Studi: Magister Administrasi Publik, Universitas Kadiri Kediri.

Implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Indonesia membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan-nya. Dalam hal ini kesiapan daerah dalam merespon Undang-undang tersebut akan sangat tergantung dari upaya pemerintah daerah dalam menetapkan strategi pembangunan-nya. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Trenggalek. (2) Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam daripada banyaknya informasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang menggunakan sudut pandang peneliti sebagai alat analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Trenggalek ini dinilai sangat baik, baik itu dari aspek Komunikasi, aspek Sumber Daya, Aspek Disposisi, dan aspek Struktur Birokrasi dinilai sangat baik karena dalam melaksanakan sudah terdapat Standard Operasional Procedures (SOP) yang berupa teknis atau juknis. Secara garis besar dengan melalui persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. (2) Factor pendukung dan factor penghambat dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Trenggalek. (a) factor pendukung meliputi: Adanya peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang baik, tersedianya sumber daya aparatur secara kuantitas yang memadai, adanya komitmen dalam melakukan penguatan kapasitas, adanya pendidikan dan pelatihan, asiparis, pengadaan barang dan jasa, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai. (b) factor penghambat: Antara profesionalisme, kompetensi pegawai dibandingkan dengan luas wilayah binaan belum seimbang, terbatasnya sarana dan prasarana, belum optimalnya peran Pemerintah Daerah terhadap penelitian dan pengembangan sektor BUMD, masih adanya sikap arogansi dan apriori pelaku birokrasi.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRACT

AJI SATRIA WIBISONO, NIM.: 202102020112, 2024, IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 54 OF 2017 CONCERNING REGIONAL-OWNED ENTERPRISES IN TRENGGALEK REGENCY, Supervisor 1: Dr. Imam Fachrudin, M.Sc., Supervisor 2: Dr. Daimul Abror M.Si Study Program: Master of Public Administration, Kadir University Kediri.

The implementation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government in Indonesia brings its own consequences for regions in implementing their development programs. In this case, regional readiness in responding to the Law will greatly depend on the efforts of the regional government in determining its development strategy. This study aims: (1) To describe and analyze the implementation of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises in Trenggalek Regency. (2) To find out what are the supporting and inhibiting factors for the implementation of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises in Trenggalek Regency.

This study uses the approach used in this study is a qualitative approach. Qualitative research is research that seeks to find and obtain in-depth information rather than a lot of information. The analysis technique used in this study is qualitative analysis, which is a method that uses the researcher's point of view as the main analysis tool.

The results of the study indicate that: (1) The implementation of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises in Trenggalek Regency is considered very good, both in terms of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure aspects, it is considered very good because in implementing it there are already Standard Operating Procedures (SOP) in the form of technical or technical instructions. In general, through preparation, implementation, monitoring and evaluation. (2) Supporting factors and inhibiting factors in the Implementation of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises in Trenggalek Regency. (a) supporting factors include: The existence of laws and regulations that serve as a reference in order to create a good business climate, the availability of adequate quantity of human resources, the existence of commitment in strengthening capacity, the existence of education and training, asiparis, procurement of goods and services, which aim to increase employee capacity. (b) inhibiting factors: Between professionalism, employee competence compared to the area of the area of development is not yet balanced, limited facilities and infrastructure, the role of the Regional Government in research and development of the BUMD sector is not yet optimal, there is still an arrogant and a priori attitude of bureaucratic actors.

Keywords: Implementation, Government Regulations, Regionally-Owned Enterprises